



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21052 Fax. (0532) 21052 E-Mail : bappedakabkobar@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : 841.5/ ~~72~~ /Bapp-I/2021

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Nota Pertimbangan Nomor : 520/09/Bapp-III/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Perihal: Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi/ Konsultasi ke Provinsi Kalimantan tengah

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : **Ir. KUSMIYATUN**
N I P : 19670824 199303 2 006
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Kotawaringin Barat
 2. Nama : **HERMAYADI, S.Pi, M.Si**
N I P : 19660614 199403 1 008
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian Bappeda Kab. Kotawaringin Barat
 3. Nama : **SUPRAPTI, SP**
N I P : 19820208 200803 2 002
Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perdagangan, Industri, dan Investasi Bappeda Kab. Kotawaringin Barat Pada Bappeda Kab. Kotawaringin Barat
 4. Nama : **INDAH YULIANI**
N I P : -
Pangkat / Golongan : -
Jabatan : Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Pada Bappeda Kab. Kotawaringin Barat

- Untuk :
- Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama Penugasan selama 3 (tiga) hari, terhitung tanggal 25 s/d 27 Agustus 2021
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 24 Agustus 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21052 Fax. (0532) 21052

Website : bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id, E-Mail : bappedakabkobar@yahoo.co.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
Dari : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Bara
Hari/ Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi/ Konsultasi ke Provinsi Kalimantan tengah

I. Dasar Pelaksanaan

1. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan;
3. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022, yaitu Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas, yang diwujudkan melalui 6 misi, dimana salah satu misinya yaitu misi yang ke 3 (tiga) : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri, serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Surat Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 841.5/73/Bapp-II/2021 Tanggal 24 Agustus 2021.

II. Tujuan Perjalanan

Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Bappedalitbang dan Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah.

III. Tempat&Tanggal

1. Tempat : Bappedalitbang dan Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Tanggal : 25 s/d 27 Agustus 2021.

IV. Pelaksanaan Kegiatan

Kunjungan Koordinasi dan Konsultasi ke Bidang Ekonomi SDA dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Kalimantan Tengah serta ke Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah terkait dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kotawaringin Barat terhadap :

1. Implementasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
2. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui program penguatan usaha ultra mikro (UMi);
3. Terwujudnya ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketahanan pangan Desa.

V. Informasi dan Hasil Kegiatan

1. Rombongan dari BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat diterima diruangan Ibu Novarina, SP selaku Kepala Sub Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi SDA dan Kerjasama BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Berdasarkan UU No 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (Pasal 9);
3. Amanat undang-undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Selanjutnya untuk menghambat laju konversi maka diperlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya;

4. Lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 27.000 Ha (informasi dari BPN sebanyak 6.000 Ha SHM). yang tersebar di 6 Kecamatan yang perlu dipertahankan peruntukkannya dan agar segera di buat Perda/ Perbub/ SK Bupati karena merupakan syarat pengajuan Dana DAK (Tahun ini) dan tidak menutup kemungkinan yang akan datang menjadi syarat pula pengajuan usulan Dana Tugas Pembantuan (Dekon) ke Pemerintah Pusat;
5. Salah Satu keuntungan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah bahwa telah diinisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengajukan Perda terkait LP2B;
6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung segera direvisi Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dapat dicantumkan redaksi kawasan LP2B yang sebelumnya hanya berupa kawasan pertanian;
7. Perda RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2004 sudah mulai berproses, tahun 2020 ini akan ada revisi dan peninjauan kembali pada tahun 2023;
8. Provinsi Kalimantan Tengah berupaya ada reward kepada kelompok-kelompok tani yang berhasil mempertahankan lahan tanaman pangan berkelanjutan (apabila LP2B sudah berhasil diundangkan) berupa bantuan saprodi maupun pembinaan kepada kelompok yang bersumber dari Dana Pusat (APBN) maupun APBD-Provinsi;
9. Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui program penguatan usaha ultra mikro (UMi) yang didalamnya terdapat kegiatan pembiayaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan fasilitasi pemasaran produknya;
10. Data UMKM Kotawaringin Barat tercatat sebelum pandemi sebanyak 5.743 UMKM dan 10.292 UMKM setelah pandemi (mengalami penambahan sebanyak 4.549 UMKM) berdasarkan data per 31 Desember 2020;
11. Bantuan Pemerintah/ stimulus diberikan kepada UMKM berupa fasilitasi sarana prasarana usaha, melalui program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat telah memfasilitasi sarana prasarana dan bahan baku produksi kepada para pelaku UMKM;
12. Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM antara lain adalah terjadi penurunan omzet penjualan (50-60%) yang berdampak kepada menurunnya pendapatan pelaku UMKM; Mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan/ kredit permodalan dan sulit atau kekurangan bahan baku produksi, diharapkan program UMi dapat membantu UMKM bertahan dan berkembang;
13. Pada prinsipnya juga Pemerintah Provinsi mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketahanan pangan Desa, mengingat saat ini basis dan arah sasaran program/ kegiatan langsung ke Desa, dimana ada 18 indikator pada SDG's yang harus dicapai sesuai prioritas yang mengacu baik di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;
14. Bagaimanapun, Dana Desa menjadi Kewenangan Pusat, Pemerintah Daerah hanya mendistribusikan sesuai regulasi yang berlaku;
15. Pada Tahun 2021 HKM Karya Masyarakat (telah mendapat SK dari Kementerian Kehutanan dan telah melaksanakan kegiatan konservasi alam di Danau Masyarakat) yang berlokasi di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama akan mendapat bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berupa Gazebo dan Pintu Gerbang;
16. Pemerintah Kotawaringin Barat melalui Bidang Ekonomi Bappeda Kobar menginginkan agar produk unggulan yang ada di Kecamatan Kotawaringin Lama berupa Gula Aren tetap bertahan, lestari dan kedepan agar dibantu saprodi berupa bibit aren ataupun peralatan mesin untuk UMKM, hal ini akan diupayakan Pemerintah Provinsi dari Dana APBD Provinsi SKPD terkait, saat ini belum menjadi prioritas karena produksinya yang kecil. Komoditas yang diprioritaskan adalah Kopi, Karet, Kakao dan Kelapa Sawit (replanting);
17. Adanya tumpang tindih Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan calon bandara Baru di Desa Sabuai Kecamatan Kumai agar menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengingat saat ini, KEK hampir tidak ada progres namun Kawasan Industri (KI) Surya Borneo yang menjadi Prioritas dan didorong untuk percepatan pembangunan infrastrukturnya sesuai usulan Pemkab. Kotawaringin Barat dan ada surplus di KI Surya Borneo. KEK yang sedang menjadi fokus Pembangunan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah KEK Batanjung dan Begandang di Katingan;

18. Kotawaringin Barat telah berhasil dalam kegiatan integrasi sawit-sapi, namun belum bisa menjadi prioritas pengembangan sapi dikarenakan belum solidnya peternak sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat (seperti yang diungkapkan Bapak Paturrahman, S.Pt., MM, Kepala Bidang Peternakan dan Keswan Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah);
19. Beliau (Kabid. Peternakan dan Kesehatan Hewan) menerangkan, awal mulanya dulu daerah Kubu Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dijadikan daerah pengembangan sapi bali, namun seiring berjalannya waktu dan ada kepentingan-kepentingan tertentu pindah ke Kabupaten Sukamara;
20. Disampaikan Beliau juga bahwa bantuan dari Pusat dan APBD Provinsi baik reguler maupun aspirasi Tahun 2021 banyak mengalir ke wilayah Barat;
21. 17 Kelompok Ternak pada tahun 2021 telah terverifikasi akan mendapat bantuan dari Dana Aspirasi terdiri dari 6 kelompok berupa ternak sapi bali, 1 kelompok ternak kambing, 5 kelompok ternak domba dan 5 kelompok berupa 1 paket bantuan ternak ayam petelur beserta pakan dan kandang;
22. Prospek bisnis ternak ini apabila peternak jeli dari hasil kotoran ternak dapat dibuat pupuk kandang yang harga jualnya saat ini bisa mencapai Rp. 30.000,-/ karung.
23. Ada wacana komoditas yang bisa dikembangkan adalah tanaman pinang, seperti kelapa sawit, perlu petani yang bermodal kuat dan tekad kuat mau melaksanakan budidaya pinang batara ini serta ada MoU antara calon petani dan PT yang akan membeli hasil pinang apabila telah panen, apabila produk tanaman kelapa sawit dikehendaki oleh 3 negara saja maka produk tanaman pinang ini dijual di 23 negara (seperti yang dijelaskan Pak Paturrahman);

VI. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu didorong segera difinalkan hasil identifikasi lahan eksisting pertanian pangan berkelanjutan dan sinkronisasi antara data TPHP, PUPR serta BPN untuk selanjutnya dibuat payung hukum berupa Perda/ Perbub.
2. Perlu koordinasi lebih lanjut antara KPPN dan Disperindagkop&UKM serta UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mensukseskan program UMi.
3. Perlu reward juga pembinaan intens kepada kelompok tani agar tidak alih fungsi lahan juga dalam rangka ketahanan pangan.
4. Perlu dibenahi sistem manajemen dan dukungan stake holder serta pengusaha sukses untuk bersama-sama mengembangkan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat agar tidak ada lagi perorangan melainkan beternak skala usaha bersama.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, terima kasih.

Pangkalan Bun, 30 Agustus 2021
Yang Melakukan Perjalanan Dinas:

1. Ir. KUSMIYATUN
NIP. 19670824 199303 2 006

1. 

2. HERMAYADI, S. Pi., M.Si
NIP. 19660614 199403 1 008

2. 

3. SUPRAPTI, SP
NIP. 19820208 200803 2 002

3. 

4. INDAH YULIANI
NIP. -

4. 

LAMPIRAN :

Dokumentasi Kunjungan Koordinasi dan Konsultasi ke Bidang Ekonomi SDA dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Kalimantan Tengah serta ke Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah



Kunjungan ke Bidang Ekonomi SDA dan Kerjasama BAPPEDALITBANG Prov.KALTENG



Kunjungan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prv.Kalteng



Hand tractor yang terdapat di halaman Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah